

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKjIP)
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya pada kesempatan ini kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jumantono tahun 2021 (LAKjIP Tahun 2021).

Adapun dalam penyusunan LAKjIP tahun 2021 ini, kami selaku penyusun menggunakan referensi dari :

- a. Rencana Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.
- b. DPA – SKPD Kecamatan Jumantono Tahun 2021.
- c. Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang disusun PPTK dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Jumantono Tahun 2021.
- d. Buku materi Bimbingan Teknis penyusunan LAKjIP Tahun 2021.
- e. Surat Bupati Karanganyar No.061/811.7, tentang Penyusunan Dokumen SAKIP.
- f. Data Primer dan Sekunder di Kantor Kecamatan Jumantono.

Selanjutnya atas selesainya penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyusun sampai dengan selesainya laporan ini dibuat. Kami menyadari, dalam penyusunan LAKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu mohon maaf yang setulus tulusnya. Semoga dengan berakhirnya LAKjIP ini semakin memotivasi kami untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun 2021

Jumantono, Januari 2022
CAMAT JUMANTONO

SUGIHARJO,S.IP,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP: 19711108 199203 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Tahun Anggaran 2021, Kantor Kecamatan Jumantono berdasarkan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan Misi yang ingin dicapai yaitu :

- A. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh
- B. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
- C. Pendidikan Gratis SD /SMP dan Kesehatan Gratis.
- D. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.
- E. Peningkatan Kualitas Kegamaan, Sosial Budaya ,Pemberdayaan Perempuan ,Pemuda dan Olah Raga.

Dari Misi dimaksud dijabarkan dalam program –program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, yaitu :

- a) Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .
- e) Pengembangan dan Pembangunan Wilayah.

Pada tutup Tahun Anggaran 2021, kegiatan – kegiatan tersebut telah dapat direalisasikan serta dipertanggungjawabkan dari aspek administratif maupun keuangan.

Demikian Ikhtisar Eksekutif yang bisa disampaikan untuk menjadikan maklum.

Jumantono, Januari 2022
CAMAT JUMANTONO

SUGIHARJO,S.IP,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP: 19711108 199203 1 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	4
A. Rencana Strategis	4
B. Rencana Anggaran.....	4
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	5
A. Skala Pengukuran	5
B. Capaian Indikator Utama.....	6
C. Realisasi Anggaran.....	7
BAB VII.PENUTUP.....	10
1. Kesimpulan	10
2. Rekomendasi.....	11
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
- Indikator Kinerja Utama (IKU)	
- Cascading IKU	
- Rencana Aksi	
- Pengukuran Kinerja (PK)	
- Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
- Perjanjian Kinerja	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance* dan *clean governance*) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (*Outcomes oriented*), SAKIP diimplementasikan secara “*Self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah. Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur atau mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Karena LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Dengan adanya LKjIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai faktor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian bisa dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.3. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025:
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 49);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor.64 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 82);

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor.117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar mengemban tugas untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah fungsi penunjang. Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang bertugas membantu Bupati. Kecamatan merupakan koodinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar beralamat di Jalan Kakum Nomor.19, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, telp/fax. (0271) 7889165, email.Jumantonokec@gmail.com

A. Kepegawaian

Kecamatan Jumantono dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

1) Menurut Jabatan/Eselon/JFU :

Jumlah Pegawai Negeri pada Kecamatan Jumantono sebanyak 19 orang, seperti terinci dalam tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/eselon/JFU

Unit Kerja	Eselon III	Eselon IV	JFU	Total
1	2	3	4	5
Sekretariat	2	2	3	7
Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	3
Seksi Pemberdayaan Masy Desa	-	1	1	2
Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	2
Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1	2
Seksi Ketentraman dan Ketertiban	-	1	2	3

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumantono (2021)

2) Menurut Golongan :

Berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai pada Kecamatan Jumantono dirinci sebagai berikut :

Tabel.1.4.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Jumantono Tahun 2021

No	Golongan	Jumlah	
		L	P
1	Golongan II	2	0
2	Golongan III	7	5
3	Golongan IV	2	0
Jumlah		11	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumantono (2021)

3) Menurut Tingkat Pendidikan :

Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai pada Kecamatan Jumantono berijazah strata 1 (S1), lebih jelas dirinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel.1.4.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kecamatan Jumantono Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah	
		L	P	L	P
1	SMP Sederajat	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	3	2	3
3	D3	0	0	0	0
4	S1	6	1	6	1
5	S2	3	1	3	1
Jumlah		11	5	11	5

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Jumantono (2021)

B. Fungsi Strategis

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan dimaksud perlu dilakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumberdana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jumantono adalah :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kecamatan Jumantono dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi;
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan;
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi/subag dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan;
4. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah desa;
5. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial;

1.5. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jumantono adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5. Sistematika Pelaporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja
- 2.4. Rencana Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Skala Pengukuran
- 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 3.3. Pengukuran Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jumantono tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi: “Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar”

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: (1) berjuang; (2) bersama; (3) memajukan; (4) Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata “Berjuang” sebagai “berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu; berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (i) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (ii) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (iii) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata “Bersama” dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/asosiasi /forum/lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatannya yang dianggap baik dan berguna. Konsep “Bersama” juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, isemua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, onitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata “Maju” sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan ketentuan khusus.
- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat,
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar.

Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman. Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan Karanganyar atau Karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan Karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur "maju" mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5) Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- M sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- A sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- J sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- U sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara

elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera. Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme

sehingga mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. PEMBERDAYAAN olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Kecamatan Jumantono menjadi salah satu perangkat daerah yang berperan dalam mewujudkan misi kelima yaitu Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Ringkasan Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator kinerja yang tertuang dalam rencana strategi Kecamatan Jumantono Tahun 2018 – 2023.

a) Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan.

b) Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumantono beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. 2.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumantono
Tahun 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	skor	NA	NA	73	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	skor	NA	NA	87	72	74	75	75

Sumber : Renstra Kecamatan Jumantono (2018-2023)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun harus didukung dengan adanya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Program : Program Pengembangan dan Pembangunan wilayah

Kegiatan :

- 1) Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban.
- 2) Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial.
- 3) Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat.
- 4) Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan.

Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Kecamatan Jumantono yang

akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi. Rencana Kinerja Kecamatan Jumantono pada Tahun 2021 dituangkan ke dalam program, yaitu : Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 247.096.100,-(Dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enan ribu seratus rupiah) komposisi : Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis sebesar Rp. 80.325.000,- (*delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dan anggaran pendukung tidak langsung sebesar Rp.481.255.000,- (Empat delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) Masing- masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

2.3. Ringkasan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2021.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kerja pegawai (SKP).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kecamatan Jumantono dengan

Bupati Karanganyar Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada tabel berikut (Perjanjian Kinerja terlampir) :

Tabel. 2.3.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumantono Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	72

2.4 Rencana Anggaran

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.692.586.000,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.882.019.000,- (*dua milyar seratus delapan ribu dua sebilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 481.255.000,- (*Empat ratus dealan puluh satu Dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*). Anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar,- Rp .247.096.100,- (*Dua ratus empat puluh tujuh ribu sebilan puluh enam ribu seratus rupiah*).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Skala Pengukuran

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan 4.Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Kecamatan Jumantono tahun 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan indikator kinerja utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Camat Jaten Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018 - 2023, yaitu IKM (indeks kepuasan masyarakat). IKM ini diperoleh dari penghitungan yang dilakukan pada survey kepuasan masyarakat (SKM) tiap tahunnya.

Tabel. 3.2.1
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi
1	IKM	72	70

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) tahun 2021 adalah 77,3%. Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 70 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 65%. Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 92,85 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator kinerja utama tercapai sebesar **92,85 %** atau kategori **sangat baik**.

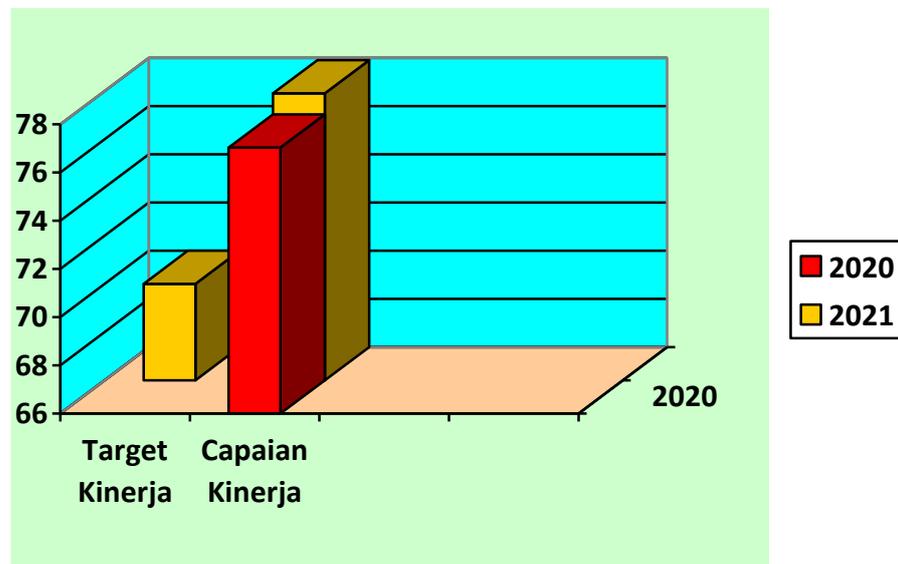
Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, capaian indikator kinerja utama pada Tahun 2020, mengalami peningkatan sebesar 11,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Jumantono sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan adanya peningkatan capaian kinerja di tahun 2021.

Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)

No	Tahun	Target	Capaian Kinerja
1	2020	87	73,40
2	2021	72	77,91

Perbandingan capaian kinerja strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2020 dan tahun 2021 apabila di gambarkan dalam grafik akan terlihat seperti grafik berikut ini :

Grafik 3.2.1
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama
IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



3.3. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Jumantono Tahun 2021 dan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono tahun 2018 – 2023, sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan hanya ada satu sasaran strategis, yaitu :

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis ini adalah skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang merupakan hasil penghitungan **survey** kepuasan masyarakat. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan

No.	Indikator Kinerja	Real. 2021	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2023)
			Target	Real	% Capaian		
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKM	NA	70	77,91	111,3%	75	103,9%
Prosentase Capaian Sasaran Strategis					111,3%		103,9%

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja utama **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan** diukur dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM). Target indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2021 adalah 72 dan realisasi IKM yang tercapai pada tahun 2021 sebesar 77,91. Dari hasil survey kepuasan konsumen yang dilakukan oleh Kecamatan Jumantono pada tahun 2020 diperoleh skor Indeks kepuasan konsumen sebesar 77, 91 apabila dibandingkan dengan target tahun 2020 maka kinerja yang tercapai adalah sebesar 111,3 % sehingga dengan kategori pelayanan “sangat baik”. Capaian kinerja indikator pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan tercapai sebesar **111,3 %** atau kategori **sangat baik**.

Kemudian capaian kinerja Tahun 2021 pada Sasaran Strategis meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada target capaian kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis telah tercapai melebihi target yaitu **103,9%**, karena pada akhir perencanaan strategis hanya di targetkan IKM sebesar 75 padahal tahun 2020 sudah tercapai sebesar 77,91.

Tercapainya sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan didukung adanya pelaksanaan Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Fasilitasi

dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi tata pemerintahan.

Berikut ini adalah beberapa foto foto kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban



2. Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat



3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat



4. Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan



3.4 Realisasi Anggaran

Konsumsi anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan** pada Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah adalah sebesar Rp. 70.320.000,- atau **100%** dari total pagu anggaran Rp.70.320.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.70.320.000,- atau **100%** dengan rincian serapan realisasi setiap kegiatan adalah sebagai berikut Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban anggaran dan realisasi sebesar Rp. 50.000.000,- (**100%**), Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial dari pagu anggaran Rp.17.525.000,- terealisasi sebesar Rp.17.525.000,- (**100%**), Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.500.000,- (**100%**) dan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi tata pemerintahan dengan pagu anggaran dan realisasi sebesar Rp. 10.100.000,- (**100%**)

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

- Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi tata pemerintahan

Tahun Anggaran 2021, Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar memperoleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebesar Rp. 2.692.586.000,- (*dua milyar enam ratus sembilan puluh dua jutalima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 1.882.019.000,- (*Satu milyar delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan belas ribu rupiah*), dan belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 481.255.000,- (*Empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu ruopiah*). Dari total anggaran baik belanja langsung maupun tidak langsung terealisasi sebesar Rp.

2.363.274.000,(dua milyar tiga ratus enam puluh tiga ribu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 100%, ,- Sedangkan khusus untuk belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 481.255.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) .

Tabel. 3.4.1

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumantono Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja	2.482.136.000	2.283.869.971	92,01
1	Belanja Operasi			
	- Belanja Pegawai	2.182.986.000	2.000.285.080	91,63
	- Belanja Barang dan Jasa	299.150.000	283.584.891	94,90
2	Belanja Modal	12.500.000	12.500.000	100

Realisasi Program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kecamatan Jumantono Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.2

Total Belanja dan Realisasi Kecamatan Jumantono Per Program dan Kegiatan Tahun 2021

NO.	PROGRAM & KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	481.246.700	38.603.782	94.80
	1.Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.000.000	4.000.000	100
	2.Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD.	4.000.000	4.000.000	100
	4.Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	8.262.500	8.262.500	100

	5.Penyediaan peralatan rumah tangga.	16.500.000.	16.500.000	100
	6.Penyediaan bahan lostik kantor	10.620.000	10.557.400	99,41
	7.Penyediaan Barang cetak dan pengadaan.	5.481.200	5.481.200	100
	8.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang.	1.980.000	1.980.000	100
	9.Penyelenggaraan rapat koordinasi SKPD.	25.000.000	24.944.000	99,78
	10.Pengadaan mebel	19.800.000	19.000.000	100
	11.Pengadaan peralatan mesin lainnya	33.375.000	33.375.000	100
	12.Pengadaan Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	187.000.000	98,50
	14.Penyediaan surat menyurat	1.350.000	1.350.000	100
	15.Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	26.800.000	23.077.668	86,11
	16.Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.	78.000.000	78.000.000	100
	17.Penyediaan jasa pemerintahan.biaya pemerintahan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.	21.608.300	21.363.850	98,87
	18.Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	12.600.000	12.600.000	100
	19.Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.	11.878.000	11.878.000	100
II	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.000.000	2.000.000	100
	1.Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.	2.000.000	2.000.000	100
III	Program Koordinasi Ketentraman dan ketertban umum	70.525.000	70.313.600	99,99
	1.Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan.	70.525.000	70.313.600	99,99

IV	Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	17.525.000	17.525.000	100
	1. Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainya guna mewujudkan stabilitas keamanan loka, regional dan nasional	17.525.000	17.525.000	100
V	Program dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	38.500.000	38.500.000	100
	1. Fasilitas, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	10.000.000	10.000.000	100
	2. Fasilitas pengelolahan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	10.000.000	10.000.000	100
	3. Fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	8.500.000	8.500.000	100
	4. Fasilitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	10.000.000	10.000.000	100

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.4.3
Realisasi Anggaran Pendukung Pencapaian Sasaran

Sasaran	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Program koordinasi ketentraman dan ketertban umum	70.320.000	70.320.000	100%
JUMLAH TOTAL		70.320.000	70.320.000	100%

Pagu anggaran pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar Rp. 70.320.000,-(Tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah),

konsumsi anggaran dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2021 sebesar Rp. 70.320.000,- (*delapan puluh juta seratus ribu rupiah*) atau 100%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 100%,- atau **100%**.

Dari hasil tersebut apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu tahun 2020, terjadi penurunan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis terjadi *refocusing* yang sangat banyak akibat adanya pandemi *covid 19* yang membutuhkan banyak anggaran untuk penanganan di masyarakat. Padahal kegiatan pendukung pencapaian sasaran strategis juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk pelaksanaan seluruh kegiatan. Hal inilah yang mengakibatkan sulitnya untuk melakukan efisiensi anggaran dengan hasil kegiatan yang maksimal. Sehingga peningkatan capaian kinerja dari tahun sebelumnya juga tidak terlalu signifikan.

BAB IV

P E N U T U P

1.1. Kesimpulan

Kecamatan Jumantono merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Jumantono dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Jaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana prasarana secara efektif dan seefisien mungkin.

Pada tahun anggaran 2021, Kecamatan Jumantono telah berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan capaian kinerja sasaran strategis yang sebagian besar memperoleh kategori baik. Capaian Kinerja Kecamatan Jumantono Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pengukuran rata - rata capaian kinerja seluruh Sasaran Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2021 sebesar **112,3%. (sangat baik)**.
2. Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan sebesar **112,3% (sangat baik)**.

Dalam mencapai kinerja Sasaran strategis Kecamatan Jumantono hampir tidak ada permasalahan yang cukup berarti, namun kegiatan – kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis harus di tingkatkan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang lebih bagus, sebagai koordinator pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan, Kecamatan Jumantono harus meningkatkan kualitas pelayanan dengan meningkatkan kualitas sumber daya maupun

prasarananya. Khususnya pada tahun 2021 karena terjadi *refocusing* anggaran terlebih pada anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena harus melaksanakan *social distancing* sehingga terjadi pemangkasan anggaran yang signifikan berakibat sulitnya melakukan efisiensi anggaran karena anggaran yang sangat minim.

1.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Jumantono di masa mendatang antara lain :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran;
3. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2021 Kecamatan Jumantono, semoga bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi untuk program kerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Jumantono, Januari 2022

CAMAT JUMANTONO

SUGIHARJO, S.IP.M.M.

Pembina tingkat I

NIP. 19711108 199203 1 005